

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
UNTUK PEMBANGUNAN DESA**

(Studi kasus di Kantor Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)

ERWAN SUBANDI

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. Lettu Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro

Abstrak

Peranan kepala desa penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang berhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberi suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, maka masyarakat perlu di motivasi. Dengan demikian, maka peranan kepemimpinan Kepala Desa perlu untuk ditingkatkan dalam proses pembangunan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Kualitatif. Fokus penelitian adalah Peranan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek dalam populasi adalah seluruh aparat Pemerintah Desa dan masyarakat serta organisasi-organisasi sosial yang ada di Desa Rasabou. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode teknik *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Study Pustaka (*Library Research*). Metode Analisa Data menggunakan analisa data Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Peranan Kepala Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Margorejo Kecamatan Parengan telah berperan aktif terhadap peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: *Peran Kepala Desa, Pembangunan Desa*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat rakyat dalam suasana kehidupan bengasa yang aman, tentram, tertib dan dinamis, maka pada pola pembangunan di masa depan perlu dikembangkan secara maksimal. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan yang hidup dari mata pencaharian pertanian, mempunyai kekerabatan yang kuat berpegang teguh pada hukum adat, dan mempunyai semangat gotong royong yang tinggi. Oleh karena itu, untuk rencana pembangunan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan dan kemiskinan, maka desa harus dibangun baik secara fisik maupun mental spiritual. Keberhasilan pembangunan ditingkat desa bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. (Moeljiarto T., 1987, h. 48-49). Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan akan lebih terarah, apabila adanya motivasi dari kepala desa. Peranan kepala desa penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang berhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberi suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat terdorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat diartikan pembangunan dari desa, oleh desa untuk desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu melalui program pembangunan desa, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong atau swadaya murni. Dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari

penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa.

Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, maka masyarakat perlu di motivasi. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat kurang ikut aktif untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan desa. Hal yang terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu: (1) Masih rendahnya kemampuan kepala desa dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga Masyarakat masih mementingkan kepentingan individu dari pada kepentingan umum, (2) Sikap Gotong Royong Masyarakat sudah tidak aktif, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan harus di koordinir terlebih dahulu. Dengan demikian, maka dalam proses pembangunan desa dibutuhkan peranan kepemimpinan Kepala Desa perlu untuk ditingkatkan, dalam hal ini dibutuhkan peranan. kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat desa. Berdasar latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan menjadi "Bagaimanakah Peranan Kepala Desa Margorejo Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa". Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui partisipasi masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, serta mengetahui peranan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa di desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang mungkin dapat dimanfaatkan bagi kepala desa Margorejo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang

diamati dengan menggunakan logika. Fokus penelitian adalah Peranan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek dalam populasi adalah seluruh aparat Pemerintah Desa dan masyarakat serta organisasi-organisasi sosial yang ada di Desa Rasabou. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode teknik *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling* atau pengambilan sampel secara sengaja. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Study Pustaka (*Library Researh*). Setelah semua data telah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tahapan-tahapan manajemen data yang terdiri dari: *Coding* (Code), *Editing* (Seleksi), dan *Tabulating* (Penyusunan Tabel). Metode Analisa Data menggunakan analisa data Kualitatif (Non Statistik) yang digunakan untuk penggambaran tentang permasalahan yang ditetapkan, dan nantinya akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan

Peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut:

“Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996:751).

Pengertian peranan Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi (suatu pengantar) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:

“Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu

proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.” (Soekanto, 1986:221).

Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut (1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, (2) peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan yang dikemukakan di atas merupakan sebagai perilaku dari individu. Peranan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan perilaku Kepala Desa.

Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan juga tentang otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan

Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing, serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan. Prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasil pembangunan juga harus dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pemimpin

Pemimpin adalah semua orang-orang yang disertai tugas dan tanggung jawab suatu tugas atau pekerjaan. Kepala desa sebagai pemimpin di tingkat desa, selain menjalankan kegiatan pemerintahan desa, juga harus memiliki kemampuan,

bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan. S. Prayudi Atmosudirdjo (2002:212) menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu: (1) Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, (2) Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, (3) Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, dan (4) Pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Terdapat perbedaan kepemimpinan sebuah instansi dengan kepemimpinan Kepala Desa adalah adanya kepekaan terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

Partisipasi Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana, (2) partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka (Soetrisno, 1984).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, antara lain dalam bentuk: (1) Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan

pemerintah. (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. (3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Pembangunan Desa

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pembangunan Desa, maka dapat dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat Desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat baik dalam bentuk material maupun spiritual, atau dengan kata lain, adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu pembangunan Desa dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun bentuk-bentuk organisasi pembanguan Desa harus menggunakan sistem dan prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Peranan Kepala Desa

Pengertian Peranan Kepala Desa dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan perilaku warga desanya untuk bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki. Sehingga, yang menjadi focus penelitian adalah: (1) Frekuensi Kunjungan dan Penyuluhan pada Organisasi-Organisasi di Desa. Organisasi- organisasi di Desa dalam hal ini adalah lembaga – lembaga penyelenggara pemerintahan desa dan non-lembaga penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah desa meliputi BPD, LKMD, Tim Penggerak PKK, RT dan RW. Sedangkan non-lembaga penyelenggara pemerintah desa meliputi ormas Nu, Muhammadiyah, Fatayat, kelompok pengajian dan

sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut dalam kegiatannya masing-masing memiliki anggota dan secara rutin melaksanakan pertemuan. Dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, seorang Kepala Desa menggunakan beberapa cara, salah satunya adalah pembinaan dalam bentuk kunjungan dan penyuluhan langsung.

Dalam melaksanakan penyuluhan, Kepala Desa berkerjasama dengan pihak terkait, misalnya alim ulama, BPD, PPL dan LKMD serta Dinas terkait yang ada di tingkat Kecamatan. Tujuan diadakannya penyuluhan adalah untuk memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan serta informasi-informasi yang berisikan materi tentang pelaksanaan pembangunan dan peranan masyarakat dalam pembangunan di Desa Margorejo. Penyuluhan atau pembinaan yang diprogramkan Kepala Desa Margorejo pada tahun 2013, baik yang dihadiri oleh Kepala Desa sendiri, BPD, PPL, LKMD, Alim Ulama dan Dinas Instansi terkait, berdasarkan data penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala Desa, ternyata lebih banyak dari jadwal yang direncanakan. Terdapat 11 bidang kegiatan, yaitu Agama (Islam), Pemerintahan, Politik, Pertanian, Kesehatan, Keluarga, Pendidikan, Keamanan dan ketertiban, Pemuda dan olah raga, Koperasi dan lumbung desa, Penghijauan dan sanitasi. Selama tahun 2013, direncanakan sebanyak 53 kegiatan penyuluhan/pembinaan kepala desa dan terealisasi sebanyak 71 kegiatan. Semua bidang kegiatan terealisasi lebih banyak dibanding dengan yang direncanakan, kecuali bidang kegiatan politik yang tidak ada perencanaan juga realisasi. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan atau bersama dengan Dinas Instansi pada dasarnya adalah materi dari hasil rapat dinasi ataupun materi dari program Dinas Instansi yang membidangi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengemukakan bahwa Kepala Desa Margorejo disamping kegiatan yang sudah terjadwal, seringkali melakukan kunjungan/anjingsana pada lembaga-lembaga yang ada di desa terutama saat lembaga-lembaga tersebut melakukan suatu kegiatan. Sebagai gambaran, dari 30

responden mengemukakan bahwa 20 Orang (66,7) menyatakan sering, 5 Orang (16,7) menyatakan Kadang-kadang dan 5 orang (16,7) menyatakan tidak pernah. Sehingga, berdasar pada kegiatan anjagsana/kunjungan dan penyuluhan oleh Kepala Desa, maka menggambarkan bahwa komunikasi di Desa Margorejo telah terbangun; (2) Frekuensi kunjungan Kepala Desa pada Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. Ketua RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, serta tokoh agama merupakan kepanjangan

tangan dari Kepala Desa dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan informasi kepada masyarakat, serta sebagai sarana menampung aspirasi dan keinginan warga masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi timbal balik antara Kepala Desa dengan Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 responden dapat dijelaskan tentang frekuensi kunjungan Kepala Desa pada Ketua RT/RW, Tokok masyarakat, dan tokoh agama yang tertulis pada Tabel 1.

Tabel 1 Frekuensi kunjungan Kepala Desa pada Ketua RT/RW, Tokokmasyarakat, dan tokoh agama

NO	RESPONDEN	SERING		KADANG - KADANG		TIDAK PERNAH		JUM LAH
		JML	%	JML	%	JML	%	
1	Ketua RT	11	36,67%	14	46,67%	5	16,67%	30
2	Ketua RW	11	36,67%	14	46,67%	5	16,67%	30
3	Perangkat Desa	30	100%	0	0%	0	0%	30
4	BPD	15	50%	10	33,33%	5	16,67%	30
5	LKMD	15	50%	10	33,33%	5	16,67%	30
6	TP PKK	11	36,67%	10	33,33%	9	30%	30
7	KK	10	33,33%	15	50%	5	16,67%	30
	Rata-rata	14.7	49.05%	10.4	34.76%	4.8	16.19%	30

Sumber : Hasil wawancara dengan responden

Berdasarkan jawaban responden tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa reponden perangkat desa memberikan jawaban 100% bahwa Kepala Desa sering mengadakan kunjungan. Sedangkan responden dari Kepala Keluarga lebih banyak yang menyatakan bahwa Kepala Desa kadang-kadang mengadakan kunjungan (50%). Namun demikian rata-rata jawaban responden menyatakan bahwa Kepala Desa sering melakukan kujungan pada Ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama (49,05%). Selain itu, berdasarkan Buku Harian Kepala Desa Margorejo, dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa juga melakukan kunjungan diluar jadwal kunjungan. Frekuensi dan lokasi kunjungan Kepala Desa diluar kegiatan yang sudah terjadwal pada tahun 2013, adalah kunjungan ke Dusun Krajan sebanyak 3 kali kunjungan, Dusun Kentong sebanyak 4 kali kunjungan, dan Dusun Gempol sebanyak 2

kali kunjungan. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa kunjungan Kepala Desa di luar jadwal kunjungan yang sudah direncanakan, ternyata secara informal juga mengadakan kunjungan ke masing-masing dusun; (3) Frekuensi Kehadiran Kepala Desa pada Undangan-undangan organisasi – organisasi di Desa. Kehadiran seorang pemimpin ditengah-tengah anggotanya merupakan motivasi dan daya dorong anggotanya dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai tauladan dan panutan bagi pengikutnya. Demikian juga bagi Kepala Desa Margorejo, dimana kehadiran Kepala Desa dalam setiap undangan, minimal akan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk hadir dan berperan aktif apabila diundang oleh Kepala Desa. Berdasarkan Buku Agenda Surat Masuk setelah diinventarisir dan di edit pada tahun 2013 Kepala Desa telah diundang oleh BPD, LKMD, TP PKK, Ketua RW, Pengajian Ibu-Ibu, Panitia PHBI, Pengajian

NU dan pertemuan Pengurus Muhammadiyah. Dari beberapa kegiatan tersebut tingkat kehadiran Kepala Desa pada tahun 2013 rata – rata 60,6%.

Adapun ketidak hadirannya Kepala Desa pada acara undangan tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dijelaskan tentang ketidak hadirannya tersebut yang disebabkan karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, namun demikian tetap menugaskan Sekretaris Desa atau Pamong lainnya untuk hadir. Dengan demikian diketahui bahwa sebagian besar undangan yang ditujukan ke Kepala Desa di hadiri sendiri, dengan jumlah undangan 34 dan yang dihadiri 29 (85,29%) serta jumlah yang tidak hadir semuanya sudah diwakilkan ke Sekretaris Desa; (4) Kepedulian Kepala Desa terhadap permasalahan dan berbagai kegiatan serta rapat-rapat di Desa BPD, LKMD, HIPPA, dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan responden, apabila terdapat permasalahan yang muncul di Desa Margorejo Kecamatan Parengan ternyata sebagian besar menyatakan, bahwa Kepala Desa Margorejo sering berperan aktif dan berusaha memberikan solusi, serta mencari jalan pemecahannya (78,1%). (5) Frekuensi pembinaan Kepala Desa kepada perangkat Desa. Kepala Desa Margorejo setiap bulannya menjadwalkan rapat rutin dengan para pamong desa setelah pelaksanaan rapat Dinas Kepala Desa Kantor Kecamatan. Namun demikian berdasarkan pengamatan peneliti, ternyata dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintah desa, para perangkat desa belum dapat menjalankan tugasnya dengan tertib.

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.

Program-program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Margorejo Kecamatan Parengan pada tahun 2013 adalah MUSRENBANGDes, program Alokasi Dana Desa (ADD), Program Pembangunan yang berasal dari dana swadaya masyarakat, serta program nasional penanggulangan kemiskinan (PNPM). Partisipasi masyarakat Desa Margorejo

dalam pelaksanaan pembangunan dapat dikaji dari: (1) Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan di desa. Keikutsertaan masyarakat di sini dapat diukur dari tingkat kehadiran serta peran aktifnya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan mulai dari tahap sosialisasi, pembentukan organisasi, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan hasil-hasilnya.

Mengacu mekanisme perencanaan pembangunan desa, setiap menjelang akhir tahun anggaran BPD bersama-sama dengan kepala Desa membahas Rencana Program Kerja Tahunanan Desa dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada kegiatan ini yang terlibat adalah : Ketua RT/ RW, Tokoh Masyarakat, 1 (satu) wakil dari masing-masing RT, anggota BPD, pengurus LKMD, Tim Penggerak PKK Desa dan Kepala Desa beserta perangkatnya. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kehadiran undangan pada acara pembahasan Rencana Program Kerja dan RAPBDes Desa Margorejo Kecamatan Parengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa tingkat kehadiran undangan sebagian besar telah di hadiri, hanya dari BPD yang hadir Cuma ketua, wakil ketua dan bendahara. Apabila dilihat dari Buku Notulen Rapat, dalam kegiatan ini semua peserta yang hadir berupaya mempertahankan usulan rencana program pembangunan dari masing – masing peserta. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kemudian Kepala Desa bersama-sama dengan Pengurus LKMD khususnya Ketua Seksi Pembangunan membuat rencana program di bidang pembangunan, sedangkan untuk rencana program rutin disusun oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Perangkat Desa. Hasil rumusan tersebut dipadukan dengan rumusan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Program kerja Tahunanan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan Buku Notulen Rapat, Pembahasan tersebut dilakukan 2 (dua) kali. Dari mekanisme tersebut, tingkat kehadiran dalam pembahasan Rencana Program Tahunanan dan

RAPBDes, berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: terlihat adanya penurunan tingkat kehadiran yaitu pada BPD yang diundang sejumlah 7 orang dan yang hadir hanya 3 orang (42,96%). Ketidakhadiran disebabkan karena ada kegiatan lain.

Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan program-program pembangunan yang di laksanakan di Desa Margorejo, dapat digambarkan bahwa tingkat kehadiran undangan sudah memenuhi kriteria dalam melaksanakan program pembangunan Desa, dan harapannya bisa tercapai dalam meningkatkan pembangunan desa margorejo kecamatan parengan. Sedangkan keterlibatan unsur-unsur masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan di atas, berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan. Demikian pula dalam program PKK, pemilihan tim 6 yang mewakili desa dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapannya melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan perangkat desa, BPD, LKMD dan Tim Penggerak PKK. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa margorejo sesuai dengan tujuan program tersebut, secara umum telah melibatkan unsur-unsur masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua LKMD. Bahwa “untuk program PKK, dalam pelaksanaannya, khususnya swadaya masyarakat berupa tenaga telah melibatkan seluruh masyarakat”. Kegiatan pembangunan desa yang ada di Desa Margorejo pada tahun 2013 yang secara langsung membutuhkan swadaya masyarakat berupa tenaga adalah kegiatan-kegiatan renovasi Masjid di dusun Krajan, kerja bakti di lingkup sekolah dasar di Dusun Kentong dan membuat akses jalan masuk ke pemakaman desa di Dusun Krajan. Hasil dari penelitian menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan – kegiatan tersebut secara umum mencapai kelancaran, hal itu dikarenakan dalam kegiatan tersebut sudah terjadwal dalam jadwal giliran swadaya yang diterapkan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh semua masyarakat (2) Tingkat swadaya masyarakat baik berupa uang dan maupun material

disumbangkan oleh masyarakat terhadap pembangunan desa. Partisipasi masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Parengan berupa uang dan atau material dalam pelaksanaan pemangunan Desa tahun 2013 adalah pada tahun 2013 terdapat 3 proyek pembangunan, Swadaya masyarakat terbesar pada tahun 2013 adalah untuk pembangunan Musholla.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Peranan Kepala Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: (1) Peranan Kepala Desa dalam penyuluhan / pembinaan, bahwa penyuluhan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, (2) Kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Desa Margorejo realisasinya juga meningkat dari rencana, (3) Pembinaan pamong Desa dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali dan juga termasuk prioritas pelayanan kepada masyarakat, (4) Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari prosentase realisasi jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, terdapat peningkatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Margorejo Kecamatan Parengan berperan terhadap peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembngunan Desa di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljarto Jokro Winoto.1987. **Politik Pembangunan Sebuah Analisa, konsep, Arah Srategi, Tiara Wacana.**Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996:751
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
- Sukanto, **Beberapa Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.**1986. CSIS, Jakarta
- S. Prajudi Admosudirdjo.2002.**Beberapa Pandangan Umum Tentang**

pengambilan Keputusan, (Decision Making). Jakarta : Ghalia Indonesia
Soetrisno, hadi.1984.**Methodologi Research Jilid I, Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM.** Jogjakarta
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Copyright: E-Jurnal Unigoro

Copyright: E-Jurnal Unigoro